

PERAN PARTAI POLITIK TERHADAP KEBERHASILAN ANGGOTA LEGISLATIF

Nauval Putra Rangkuti¹, Tamaulina Br Sembiring²Email: Nauvalrangkuti2@gmail.com , tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstract

The success of legislators in carrying out their legislative, budgetary, and oversight functions cannot be separated from the role of political parties as institutions that recruit, educate, and support their cadres. This article aims to analyse the role of political parties in the success of legislators in carrying out their duties and responsibilities. The method used is a literature study with a descriptive-analytical approach to various relevant literature. The results of the study show that political parties play an important role through political recruitment, education and cadre development, ideological strengthening, and structural and political support. These roles contribute significantly to the capacity, integrity, and performance of legislators.

Keywords: *Political Parties, Legislators, Legislative Performance*

Abstrak

Keberhasilan anggota legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik sebagai institusi yang merekrut, mendidik, dan mendukung kadernya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran partai politik terhadap keberhasilan anggota legislatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa partai politik berperan penting melalui fungsi rekrutmen politik, pendidikan dan kaderisasi, penguatan ideologi, serta dukungan struktural dan politik. Peran tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap kapasitas, integritas, dan kinerja anggota legislatif.

Kata kunci: Partai Politik, Anggota Legislatif, Kinerja Legislative

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi modern, partai politik menempati posisi yang sangat strategis sebagai institusi perantara antara rakyat dan negara.¹ Keberadaan partai politik tidak hanya berfungsi sebagai peserta pemilihan umum, tetapi juga sebagai sarana utama dalam mengartikulasikan, mengagregasikan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam proses pengambilan kebijakan publik. Melalui mekanisme yang dimiliki partai politik, kepentingan yang beragam dari masyarakat dapat diformulasikan menjadi agenda politik yang terstruktur dan diperjuangkan secara konstitusional dalam lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga legislatif.

Salah satu peran fundamental partai politik dalam sistem demokrasi adalah melakukan rekrutmen politik terhadap calon-calon pemimpin publik, termasuk calon anggota legislatif.² Proses rekrutmen ini menjadi sangat penting karena akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Partai politik idealnya tidak hanya mempertimbangkan aspek elektabilitas, tetapi juga kapasitas intelektual, integritas moral, serta komitmen calon terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa anggota legislatif yang diusung benar-benar mampu menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal.

Keberhasilan anggota legislatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hasil dari kemampuan individual. Faktor struktural dan institusional, khususnya peran partai politik yang menaunginya, memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Partai politik berperan dalam membentuk orientasi dan sikap politik anggota legislatif melalui ideologi, platform, serta garis kebijakan partai. Orientasi ini menjadi pedoman bagi anggota legislatif dalam bersikap dan mengambil keputusan politik, baik dalam proses pembentukan undang-undang maupun dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.³

Selain itu partai politik juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi anggota legislatif melalui pendidikan politik dan kaderisasi yang berkelanjutan. Pendidikan politik yang sistematis dapat membekali anggota legislatif dengan pemahaman yang memadai mengenai sistem ketatanegaraan, teknik legislasi, etika politik, serta dinamika kebijakan publik. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan tersebut, anggota legislatif diharapkan mampu menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab.⁴

Partai politik menyediakan dukungan politik dan kelembagaan bagi anggota legislatif dalam menjalankan tugasnya di parlemen. Dukungan ini dapat berupa konsolidasi fraksi, advokasi kebijakan, serta perlindungan politik dalam menghadapi dinamika dan tekanan politik. Tanpa dukungan partai yang kuat dan solid, anggota legislatif akan mengalami kesulitan dalam memperjuangkan agenda politiknya secara efektif.

¹ Basuki, "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi."

² Elviandri et al., "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Pilar Demokrasi Dan Penguatan Pelembagaan Parpol Dari Conflict Of Interest Dan Abuse Of Power."

³ Labolo, Ilham, and Stp, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis-Rajawali Pers*.

⁴ Surullaha et al., "Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 Bagi Calon Legislatif DPR."

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa partai politik memiliki peran yang sangat menentukan terhadap keberhasilan anggota legislatif. Oleh karena itu, kajian mengenai peran partai politik terhadap keberhasilan anggota legislatif menjadi penting untuk dilakukan, guna memahami sejauh mana fungsi dan kinerja partai politik berkontribusi dalam mewujudkan lembaga legislatif yang efektif, berintegritas, dan responsif terhadap kepentingan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research).⁵ Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran partai politik terhadap keberhasilan anggota legislatif melalui penelaahan konsep, teori, dan pandangan akademis yang berkembang dalam literatur ilmiah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan partai politik dan kinerja anggota legislatif.⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian dokumen (document study), yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengelompokkan data yang berkaitan dengan fungsi partai politik, mekanisme rekrutmen politik, pendidikan dan kaderisasi, serta dukungan kelembagaan terhadap anggota legislatif. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis.⁷ Data yang telah diklasifikasikan dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan dan menjelaskan peran partai politik terhadap keberhasilan anggota legislatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, dan temuan dari literatur, sedangkan analisis analitis digunakan untuk menelaah hubungan antara peran partai politik dan kinerja anggota legislatif secara kritis dan mendalam. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang disusun secara logis dan runtut sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Peran Partai Politik dalam Rekrutmen Anggota Legislatif

Partai politik memiliki peran yang sangat strategis dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif, karena melalui mekanisme inilah kualitas wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan ditentukan. Rekrutmen politik tidak sekadar dimaknai sebagai proses administratif untuk memenuhi syarat pencalonan dalam pemilihan umum, tetapi merupakan tahapan awal pembentukan sumber daya manusia politik yang akan menjalankan fungsi kenegaraan secara langsung.⁸

⁵ Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif."

⁶ Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA."

⁷ Fadilah, "Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pembelajaran PPKN Untuk Pencapaian Kompetensi Sikap Spiritual Dan Sosial Peserta Didik: Studi Deskriptif Analitis Di SMP Negeri 1 Pekanbaru."

⁸ Suhaimi, "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia."

Partai politik dituntut untuk menerapkan proses rekrutmen yang transparan, objektif, dan berbasis merit.⁹ Transparansi diperlukan agar proses seleksi dapat diawasi secara internal maupun eksternal, sehingga mengurangi praktik-praktik yang bersifat transaksional atau berbasis kepentingan sempit. Sementara itu, pendekatan berbasis merit menekankan pentingnya kemampuan intelektual, integritas moral, pengalaman organisasi, serta komitmen calon terhadap nilai-nilai demokrasi dan kepentingan publik.

Rekrutmen yang dilakukan secara selektif dan bertanggung jawab akan menghasilkan anggota legislatif yang memiliki kapasitas dalam memahami persoalan masyarakat serta mampu merumuskan kebijakan publik secara rasional dan berpihak pada kepentingan rakyat. Anggota legislatif yang direkrut melalui mekanisme yang baik cenderung memiliki kesiapan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara efektif, karena telah dibekali dengan orientasi politik dan pemahaman kelembagaan sejak awal proses kaderisasi.¹⁰

Sebaliknya proses rekrutmen yang lemah dan tidak terstruktur berpotensi melahirkan anggota legislatif yang kurang kompeten dan minim integritas.¹¹ Kondisi tersebut dapat berdampak pada rendahnya kualitas kinerja legislatif serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa kualitas rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik merupakan fondasi utama bagi keberhasilan kinerja anggota legislatif. Dengan rekrutmen yang baik, partai politik tidak hanya berkontribusi pada penguatan institusi legislatif, tetapi juga pada peningkatan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

2) Pendidikan Politik dan Kaderisasi

Pendidikan politik dan kaderisasi merupakan salah satu fungsi utama partai politik yang memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas dan profesionalisme anggota legislatif. Melalui pendidikan politik, partai politik berupaya menanamkan pemahaman ideologi, nilai-nilai dasar perjuangan partai, serta orientasi kebijakan yang menjadi pedoman bagi anggota legislatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pemahaman ideologis ini penting agar anggota legislatif memiliki konsistensi sikap politik serta mampu mengambil keputusan yang selaras dengan kepentingan publik dan platform partai.¹²

Selain penguatan ideologi, pendidikan politik juga mencakup pembentukan etika politik dan moralitas publik. Partai politik memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat kepada kadernya. Etika politik yang kuat akan mendorong anggota legislatif untuk bertindak secara profesional, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.¹³

⁹ Irshadi, Sri Hadiningrum, and Pinem, "PENERAPAN FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA MEDAN."

¹⁰ Kristanto and Nofard, *Birokrasi Perwakilan Dalam Rekrutmen Jabatan Struktural*.

¹¹ RI and KONSTITUSI, "STUDI EFEKTIVITAS SISTEM REKRUTMEN DAN."

¹² Imansyah, "Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik."

¹³ Himawan et al., "Membumikan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Etika Politik: Menuju Demokrasi Pancasila Yang Maju Dan Berkeadilan: Grounding Pancasila Values as Political Ethics: Towards an Advanced and Just Pancasila Democracy."

Kaderisasi yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan partai politik mempersiapkan anggota legislatif dengan berbagai keterampilan teknis, khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan merumuskan rancangan undang-undang, memahami proses pembahasan kebijakan, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta berkomunikasi secara efektif dengan konstituen. Dengan kaderisasi yang terencana dan sistematis, anggota legislatif tidak hanya mengandalkan pengalaman personal, tetapi juga memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai.¹⁴

Pendidikan politik yang berkesinambungan akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kinerja anggota legislatif. Anggota legislatif yang memperoleh pembinaan secara konsisten cenderung lebih adaptif terhadap dinamika politik, mampu bekerja secara kolektif dalam fraksi, serta lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa pendidikan politik dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik merupakan faktor penting dalam menciptakan anggota legislatif yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dukungan Politik dan Kelembagaan Partai politik memberikan dukungan politik kepada anggota legislatif dalam bentuk arahan kebijakan, konsolidasi fraksi, serta penguatan posisi politik di parlemen. Dukungan ini memungkinkan anggota legislatif bekerja secara lebih efektif dan terkoordinasi dalam memperjuangkan agenda politiknya.¹⁵

3) Dukungan Politik dan Kelembagaan

Dukungan politik dan kelembagaan merupakan salah satu fungsi strategis partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan. Partai politik tidak hanya berperan sebagai kendaraan elektoral untuk mengantarkan kadernya ke lembaga legislatif, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan arah, penguatan, dan legitimasi politik bagi anggota legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui dukungan ini, hubungan antara partai dan wakil rakyat menjadi bersifat struktural dan berkelanjutan.¹⁶

Dukungan politik diberikan dalam bentuk arahan kebijakan yang disusun berdasarkan ideologi, visi, dan platform partai. Arahan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi anggota legislatif dalam menyikapi isu-isu publik, merumuskan sikap politik, serta mengambil keputusan di parlemen. Dengan adanya keselarasan antara kebijakan partai dan tindakan legislatif, proses legislasi dan pengawasan dapat berjalan lebih konsisten dan terarah.

Selain itu partai politik juga melakukan konsolidasi fraksi sebagai bentuk dukungan kelembagaan. Fraksi menjadi wadah koordinasi internal di parlemen yang memungkinkan anggota legislatif dari partai yang sama untuk menyatukan pandangan, menyusun strategi politik, dan memperkuat posisi tawar dalam pembahasan kebijakan. Konsolidasi ini penting

¹⁴ AR, "Studi Kaderisasi Terhadap Partai Amanat Nasional (PAN): Problematika Calon Legislatif Artis."

¹⁵ Imamia et al., *Strategi Dan Kebijakan Publik Dalam Dinamika Politik Indonesia*.

¹⁶ Putra et al., "Penguatan Ideologi Partai Politik Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia."

untuk menciptakan soliditas politik, menghindari fragmentasi sikap, serta meningkatkan efektivitas kerja kolektif di lembaga legislatif.¹⁷

Dukungan lainnya diwujudkan melalui penguatan posisi politik di parlemen, baik dalam penempatan anggota pada alat kelengkapan dewan maupun dalam negosiasi politik antarfraksi. Partai politik berperan dalam memperjuangkan posisi strategis bagi kadernya agar dapat berkontribusi secara optimal dalam proses pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penganggaran. Penguatan posisi ini tidak hanya berdampak pada individu anggota legislatif, tetapi juga pada kemampuan partai dalam memengaruhi kebijakan publik.

Secara keseluruhan dukungan politik dan kelembagaan dari partai politik memungkinkan anggota legislatif bekerja secara lebih efektif, terkoordinasi, dan sistematis dalam memperjuangkan agenda politiknya. Dukungan ini juga menjadi mekanisme penghubung antara aspirasi masyarakat, kepentingan partai, dan proses pengambilan keputusan di parlemen, sehingga peran lembaga legislatif dapat berjalan secara optimal dalam kerangka demokrasi.

4) Disiplin dan Integritas Partai

Disiplin dan integritas partai merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas kinerja serta moralitas anggota legislatif di dalam sistem politik demokratis. Keberadaan partai politik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan melalui pemilu, melainkan sebagai institusi politik yang memiliki tanggung jawab normatif dalam membina, mengarahkan, dan mengawasi perilaku politik kadernya. Dalam konteks ini, partai berperan sebagai penjaga nilai (*guardian of values*) yang memastikan bahwa setiap anggota legislatif bertindak sesuai dengan ideologi, platform, serta komitmen politik yang telah disepakati secara kolektif.

Mekanisme kontrol internal menjadi instrumen penting bagi partai politik dalam menegakkan disiplin dan integritas tersebut. Penerapan kode etik partai berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi anggota legislatif dalam menjalankan tugasnya, baik di dalam parlemen maupun dalam interaksi dengan masyarakat. Selain itu, aturan organisasi dan prosedur internal memberikan batasan yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta larangan bagi kader partai. Melalui sistem sanksi dan penghargaan, partai memiliki alat untuk menindak pelanggaran sekaligus mendorong perilaku positif, sehingga tercipta budaya politik yang menjunjung tinggi tanggung jawab dan etika.¹⁸

Disiplin partai yang sehat berkontribusi secara signifikan terhadap konsistensi sikap politik anggota legislatif. Konsistensi ini tercermin dalam keselarasan pandangan dan tindakan anggota fraksi dalam proses legislasi, pengawasan, maupun pengambilan keputusan strategis di parlemen. Dengan adanya keseragaman sikap yang didasarkan pada kesepakatan internal, partai dapat menjaga kejelasan arah kebijakan serta memperkuat posisi politiknya dalam sistem pemerintahan. Pada saat yang sama, konsistensi sikap tersebut meningkatkan

¹⁷ Simanjuntak and Collins, "SENTRALISASI KEKUASAAN DI PARLEMEN: IMPLIKASI DOMINASI SUARA FRAKSI TERHADAP DEMOKRASI PERWAKILAN DI INDONESIA: CENTRALIZATION OF POWER IN PARLIAMENT: IMPLICATIONS OF FACTIONAL VOTE DOMINANCE FOR REPRESENTATIVE DEMOCRACY IN INDONESIA."

¹⁸ Imania, Saraswati, and Asy'ari, "Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan."

akuntabilitas politik, karena masyarakat dapat dengan mudah menilai sejauh mana anggota legislatif dan partai memenuhi janji politik yang disampaikan kepada pemilih.

Selain mendorong konsistensi, disiplin partai juga berfungsi sebagai mekanisme pencegah terjadinya fragmentasi internal di dalam fraksi legislatif. Perbedaan kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak dikelola dengan baik berpotensi melemahkan soliditas fraksi dan menurunkan efektivitas kerja parlemen. Oleh karena itu, disiplin yang diterapkan secara proporsional dan demokratis membantu menjaga kohesi internal tanpa menghilangkan ruang bagi perbedaan pendapat yang konstruktif.¹⁹

Sementara itu integritas partai tercermin dari komitmen partai dalam menegakkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum di kalangan anggotanya. Integritas ini menjadi indikator penting dari kualitas demokrasi, karena perilaku anggota legislatif yang berintegritas akan berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik dan kepercayaan masyarakat. Dengan sistem pengawasan internal yang efektif, partai dapat mendeteksi dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, serta tindakan lain yang bertentangan dengan etika politik dan hukum yang berlaku.

Penegakan integritas partai tidak hanya berpengaruh terhadap reputasi dan legitimasi partai politik itu sendiri, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Ketika partai mampu menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap nilai-nilai etis dan supremasi hukum, masyarakat akan memandang lembaga legislatif sebagai institusi yang kredibel dan layak dipercaya. Dengan demikian, disiplin dan integritas partai tidak hanya menjadi kebutuhan internal organisasi politik, tetapi juga merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Peran partai politik terlihat secara nyata melalui proses rekrutmen politik yang selektif dan berbasis merit, sehingga menghasilkan anggota legislatif yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Selain itu, pendidikan politik dan kaderisasi yang berkelanjutan berkontribusi dalam membentuk pemahaman ideologis, etika politik, serta keterampilan teknis anggota legislatif, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Dukungan politik dan kelembagaan yang diberikan oleh partai politik, baik melalui arahan kebijakan, konsolidasi fraksi, maupun penguatan posisi politik di parlemen, memungkinkan anggota legislatif bekerja secara lebih terkoordinasi dan efektif. Di sisi lain, penerapan disiplin dan integritas partai melalui mekanisme kontrol internal berperan penting dalam menjaga konsistensi sikap politik serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian penguatan kelembagaan partai politik menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan lembaga legislatif yang profesional, berintegritas, dan responsif

¹⁹ Imania, Saraswati, and Asy'ari.

terhadap aspirasi masyarakat. Partai politik yang mampu menjalankan fungsi rekrutmen, pendidikan, dukungan, serta pengawasan secara seimbang akan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar partai politik meningkatkan kualitas proses rekrutmen anggota legislatif dengan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan meritokrasi, sehingga calon yang diusung benar-benar memiliki kapasitas dan integritas yang memadai. Partai politik juga perlu memperkuat program pendidikan politik dan kaderisasi secara berkelanjutan agar anggota legislatif memiliki pemahaman ideologis, etika politik, dan keterampilan legislasi yang memadai.

Selain itu, partai politik diharapkan mampu memberikan dukungan politik dan kelembagaan yang lebih optimal kepada anggota legislatif, terutama melalui penguatan peran fraksi dan koordinasi internal yang sehat. Mekanisme disiplin dan penegakan kode etik partai juga perlu diterapkan secara konsisten dan adil guna menjaga integritas anggota legislatif.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris dengan melibatkan data lapangan atau studi kasus tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran partai politik terhadap kinerja anggota legislatif dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- AR, Muhammad Irfan Dhiaulhaq. "Studi Kaderisasi Terhadap Partai Amanat Nasional (PAN): Problematika Calon Legislatif Artis." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1:162-73, 2023.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1-9.
- Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi." *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 81-94.
- Elviandri, Elviandri, Robin Dana, Sadam Kholik, and Andreyan Noor. "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Pilar Demokrasi Dan Penguatan Pelembagaan Parpol Dari Conflict Of Interest Dan Abuse Of Power." *Jurnal Retentum* 6, no. 2 (2024): 192-201.
- Fadilah, Nurul. "Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pembelajaran PPKN Untuk Pencapaian Kompetensi Sikap Spiritual Dan Sosial Peserta Didik: Studi Deskriptif Analitis Di SMP Negeri 1 Pekanbaru." Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.
- Himawan, Muh Nur, Indah Tandi Linggi, Putri Elizabeth, Muhammad Falih Saputra, Bill Jhon Kurniawan Samuda, and Agung Zulfadli. "Membumikan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Etika Politik: Menuju Demokrasi Pancasila Yang Maju Dan Berkeadilan: Grounding Pancasila Values as Political Ethics: Towards an Advanced and Just Pancasila Democracy." *Jurnal Perspektif Sosial Progresif* 1, no. 1 (2024): 1-9.

- Imamia, Anisa, Atin Ismatius Zehro, Egi Imanullah Sjarif, Tholiatur Rizkiyah, Rofiyatul Jennah, and Zulfia Rusdani. *Strategi Dan Kebijakan Publik Dalam Dinamika Politik Indonesia*. Penerbit: Kramantara JS, 2025.
- Imania, Diah, Retno Saraswati, and Hasyim Asy'ari. "Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-16.
- Imansyah, Teguh. "Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 375-95.
- Irshadi, Filzah, S H Sri Hadiningrum, and Windawati Pinem. "PENERAPAN FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA MEDAN." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 13, no. 2 (2025).
- Kristanto, Budi, and Farid Nofard. *Birokrasi Perwakilan Dalam Rekrutmen Jabatan Struktural*. Penerbit Adab, n.d.
- Labolo, Muhadam, Teguh Ilham, and S Stp. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Putra, Eduard Awang Maha, Lalu Aria Nata Kusuma, Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid, and Novia Salfat Anggraini. "Penguatan Ideologi Partai Politik Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia." *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2024): 423-49.
- RI, SELEKSI HAKIM KONSTITUSI, and SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI. "STUDI EFEKTIVITAS SISTEM REKRUTMEN DAN," n.d.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41-53.
- Simanjuntak, Zico Leonard Djagardo, and Josua Satria Collins. "SENTRALISASI KEKUASAAN DI PARLEMEN: IMPLIKASI DOMINASI SUARA FRAKSI TERHADAP DEMOKRASI PERWAKILAN DI INDONESIA: CENTRALIZATION OF POWER IN PARLIAMENT: IMPLICATIONS OF FACTIONAL VOTE DOMINANCE FOR REPRESENTATIVE DEMOCRACY IN INDONESIA." *Jurnal Nomokrasi* 3, no. 1 (2025): 163-77.
- Suhaimi, Else. "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 1 (2021): 27-51.
- Surullaha, Intan, Muhammad Faiz Razki Perdana, Hajar Auliya Azzahra, and Moh Imam Gusthomi. "Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 Bagi Calon Legislatif DPR." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 1640-46.